

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN JEMBER DALAM UPAYA PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET *SUSTAINABLE DEVELOPMENT* *GOALS*

Shinta Aurellia Rahmasari, Itok Wicaksono

Universitas Muhammadiyah Jember

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UM Jember, Jember

e-mail: shintaaurellia59@gmail.com, itokwicaksono@unmuhjember.ac.id

ABSTRAK

Pembangunan nasional merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional Indonesia ini sendiri saat ini berkesinambungan dengan tujuan dunia yang tertuang dalam 17 tujuan dan 169 sasaran dalam *Sustainable Development Goals*. Stunting merupakan salah target tujuan pembangunan berkelanjutan yang menjadi salah satu poin dalam SDGs, oleh karena itu pemerintah Indonesia berupaya menurunkan angka stunting dengan membentuk tim percepatan penurunan stunting nasional (STRANAS) Kabupaten Jember merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang saat ini masih berupaya untuk terus menurunkan jumlah stunting. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan stunting Kabupaten Jember dalam upaya percepatan pencapaian target *Sustainable Development Goals*. Fokus penelitian ini ialah bagaimana kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah dan pengimplementasiannya dalam proses percepatan penanganan stunting di Kabupaten Jember. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menggunakan teori model proses dari Van Meter dan Van Horn yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan stunting di kabupaten Jember saat ini sudah memiliki ukuran dan tujuan kebijakan yang sesuai dan terlaksana dengan baik, sumber dana dan sikap pemerintah pun dirasa sudah mendukung proses percepatan penurunan stunting ini, oleh karena itu proses implementasi dari kebijakan yang dibuat Pemerintah Kabupsten Jember dalam melakuksn upaya percepatan penurunan stunting untuk mencapai target dari SDGs sudah mampu terimplementasikan dengan baik.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, *Sustainable Development Goals*, Stunting

ABSTRACT

National development is one form of the Government of Indonesia's efforts to improve the welfare of the community. Indonesia's national development itself is currently sustainable with the world goals set out in the 17 goals and 169 targets in the Sustainable Development Goals. Stunting is one of the targets of sustainable development goals which is one of the points in the SDGs, therefore the Indonesian government seeks to reduce stunting rates by forming a national stunting reduction acceleration team (STRANAS). reduce stunting. The purpose of this study was to find

out how the implementation of stunting prevention policies in Jember Regency in an effort to accelerate the achievement of the Sustainable Development Goals targets. The focus of this research is how the policies made by the Government and their implementation in the process of accelerating the handling of stunting in Jember Regency. This research was conducted using a qualitative descriptive approach. The results of this study use the process model theory from Van Meter and Van Horn which shows that the implementation of stunting handling policies in Jember Regency currently has the appropriate size and policy objectives and is well implemented, the sources of funds and the government's attitude are felt to have supported the acceleration process. Therefore, the implementation process of the policies made by the Jember Regency Government in carrying out efforts to accelerate stunting reduction to achieve the targets of the SDGs has been able to be implemented properly.

Keywords: Policy Implementation, Sustainable Development Goals, Stunting

I. PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pembangunan nasional, pembangunan nasional ini sendiri merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dimasa yang akan datang. Pembangunan nasional Indonesia ini saat ini masih berkaitan dengan tujuan dunia. Pada sidang umum Persyarikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ke-70 pada tahun 2015 sekitar 193 kepala negara dari seluruh dunia secara bersama-sama menyepakati adanya dokumen universal baru yang disebut juga dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di dalam SDGs ini terdapat 17 tujuan dan 169 sasaran yang merupakan bahan perbaikan lanjutan dari dokumen sebelumnya yakni *Millenium Development Goals* (MDGs). Perbaikan tujuan dan sasaran yang terdapat dalam SDGs dan disetujuinya dokumen ini

oleh beberapa negara ini diharapkan nantinya dapat menjadi jalan dalam menciptakan kesejahteraan dan perdamaian dunia pada tahun 2030. Berbicara tentang SDGs atau pembangunan berkelanjutan ini maka tidak akan jauh kaitannya dengan permasalahan ekonomi dan juga kesehatan.

Negara indonesia sudah dari lama menghadapi permasalahan di bidang kesehatan, karena hingga saat ini permasalahan di bidang kesehatan ini masih cukup sulit ditangani, terlebih pada permasalahan balita pendek atau stunting. Balita pendek atau stunting merupakan kondisi dimana terjadinya kegagalan terhadap tumbuh kembang seorang anak diakibatkan kurangnya gizi kronis dalam kurun waktu yang lama. Masalah gizi ini tentunya bukanlah hal baru lagi, sudah dari lama permasalahan stunting ini coba diatasi diseluruh dunia, di negara sub sahara Afrika sendiri pada tahun 2017 berjumlah 34,5% sedangkan negara Ethiopia jumlah prevalensi stunting negaranya mencapai 52,4%. Masih

cukup tingginya angka prevalensi stunting di seluruh negara di dunia terutama negara berkembang ini menjadi permasalahan dunia, secara bersama-sama seluruh dunia terus berupaya menurunkan angka prevalensi stunting terlebih karna stunting ini sendiri juga termasuk dalam satu tujuan pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam SDGs. Oleh karena itu sampai saat ini pula Pemerintah Indonesia terus berupaya menekan angka stunting dan menurunkan jumlah prevalensi stunting, salah satu bentuk upaya pemerintah Indonesia tersebut ialah dengan di dibentuknya tim yang dikhususkan untuk percepatan penurunan stunting secara nasional atau disebut juga dengan Stranas yang diketuai langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, stranas ini dibentuk pemerintah agar program yang dibuat dapat dilaksanakan secara khusus dan fokus terhadap penanganan stunting, salah satu program utama dalam stranas ini sendiri ialah program 5 Pilar.

Program 5 pilar ini terdiri dari beberapa tujuan dan strategi yang dilakukan dalam proses penanganan stunting, pilar pertama merupakan bentuk komitmen pemerintah dengan menjadikan stunting sebagai prioritas utama bagi seluruh elemen di Pemerintahan mulai dari tingkat bawah hingga atas; pilar kedua adalah pemberian sosialisasi oleh pemerintah kepada masyarakat dengan memanfaatkan seluruh media yang ada; pilar ketiga merupakan sinkronisasi kepada seluruh lembaga mulai dari tingkat desa hingga pusat sehingga nantinya program dapat dilaksanakan dengan terstruktur; pilar keempat ini merupakan pembeberian akses yang mudah kepada masyarakat dalam mendapatkan makanan yang bergizi

sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia; pilar kelima merupakan peningkatan pemantauan atau evaluasi bertahap oleh pemerintah sehingga program yang dijalankan dapat terpantau dan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik dan bermutu. Secara garis besar program 5 Pilar tersebut merupakan bentuk upaya Pemerintah Indonesia dalam membanyu menurunkan jumlah stunting yang melibatkan seluruh elemen di pemerintahan sehingga nantinya program ini dapat mencapai target dari SDGs.

Menurut data Studi Kasus Gizi Indonesia (SSGI) kemenkes pada tahun 2020 Indonesia berada di urutan kedua tertinggi di Asia Tenggara dengan jumlah prevalensi stunting terhadap anak usia dibawah 5 tahun mencapai 31,8%, namun jumlah tersebut mampu ditekan hingga pada tahun 2021 Indonesia mengalami penurunan menjadi 24,4%. Menurunnya jumlah prevalensi stunting tersebut membuktikan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sudah cukup optimal penanganannya, namun tentunya masih perlu usaha lebih keras lagi agar angka stunting Indonesia menjadi sangat rendah.

Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang pada tahun 2021 berada di angka 23,5% prevalensi stuntingnya, sehingga Pemerintah Provinsi terus berupaya melakukan penurunan stunting. Kabupaten Jember merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Jawa Timur yang hingga saat ini juga tengah berupaya menurunkan angka prevalensi stunting, Jember pernah menduduki

angka tertinggi kedua se Jawa Timur dengan prevalensi stunting 37,08% pada pertengahan tahun 2021. Menilik penyebabnya Bupati Kabupaten Jember menyatakan masih tingginya angka stunting ini disebabkan oleh kurangnya masyarakat, terlebih perekonomian masyarakat yang rendah menyebabkan kurangnya pendidikan sehingga mengakibatkan banyak sekali pernikahan dini terjadi di Kabupaten Jember. Pemerintah Kabupaten Jember berupaya dengan dalam mengatasi permasalahan stunting di Kabupaten Jember sehingga pada akhir tahun 2021 jumlah stunting di kabupaten Jember ini menurun menjadi 11,74%.

Menurunnya angka prevalensi stunting ini membuktikan komitmen pemerintah dalam mengatasi stunting sangatlah besar, namun tentunya perlu ada sinergi dari seluruh pihak agar Jember dapat mencapai *zero case*. Regulasi dan kebijakan pun dibuat oleh Pemerintah kabupaten Jember untuk membantu menurunkan kasus stunting, sesuai dengan Peraturan Bupati no 49 tahun 2021 mengenai percepatan pencegahan stunting terintegrasi di Kabupaten Jember maka Pemerintah telah berintegrasikan dan berkomitmen tinggi dalam menurunkan jumlah prevalensi stunting untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan atau SDGs.

Tujuan dari dibuatnya penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana proses implementasi kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam menangani stunting dalam mencapai target dari SDGs, sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan stunting di Kabupaten Jember ini dengan judul “Implementasi kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Jember dalam upaya

percepatan pencapaian target *Sustainable development goals*”

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dan lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Jember pada tahun 2022. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan dan mengidentifikasi masalah stunting yang terjadi di Kabupaten Jember dan bagaimana peran serta pengimplementasian kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah dalam upaya percepatan penurunan stunting. Sumber data yang di dapatkan dari penelitian ini bersumber pada web resmi Kabupaten Jember dan juga penelitian sebelumnya. Data primer dari penelitian ini di dapat dari proses wawancara yang saya lakukan kepada 5 orang narasumber yang berasal dari Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, Dinas kesehatan dan Duta insan genre Kabupaten Jember. Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan juga wawancara.

III. STUDI KEPUSTAKAAN

Penelitian dari Nurmasari Situmeang dan Sindy Yulia Putri yang dilakukan pada tahun 2021 ini diberi judul “Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) Pada Kasus Stunting di Indonesia” yang didasari oleh keadaan dimana negara Indonesia memiliki SDM di urutan ke 87 dari 157 negara di dunia dan dalam pembangunan berkelanjutan pertumbuhan SDM Indonesia yang baik ialah terhindar dari stunting. Maka dari

itulah penelitian ini memilih topik stunting karena urgensi untuk meningkatkan daya saing SDM Indonesia secara regional maupun internasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengaplikasikan konsep dari Sustainable Development Goals yang digunakan sebagai acuan atau kerangka kerja oleh Pemerintah Indonesia dalam usaha menurunkan jumlah stunting. Hasil dari penelitian ini adalah perlu adanya kolaborasi antara Pemerintah Indonesia dengan kementerian atau lembaga terkait sangat dibutuhkan dalam usaha penurunan prevalensi stunting di Indonesia, maka dari itu sinergitas dan kerjasama antar pemangku negara atau kementerian serta dilakukannya kolaborasi bersama para akademisi, sarjana kesehatan, perusahaan dan bantuan dari negara lain sangat dibutuhkan pula. Karena permasalahan stunting ini merupakan masalah bersama yang memerlukan bantuan seluruh pihak dalam mengatasinya.

Pada penelitian ini lebih fokus terhadap mengaplikasikan konsep SDGs dalam mengatasi stunting serta melakukan sinergitas dari seluruh elemen di tingkat pemerintahan dan kolaborasi dengan para akademisi, sarjana kesehatan dan perusahaan serta bantuan dari negara lain. Sedangkan penelitian yang sekarang membahas mengenai bagaimana implementasi dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintha Kabupaten Jember dalam menangani stunting dan mencapai target dari SDGs.

Penelitian dari Irma Fitriana dan Arief Budi Utomo yang berjudul “Menilik Tantangan Pembangunan Kesehatan di Indonesia: Faktor Penyebab Stunting di Kabupaten Jember” ini disusun pada tahun 2020 ini

mengfokuskan kajian stunting ini pada Desa Ledokombo dan Desa Kalisat. Penelitian ini menjelaskan mengenai faktor penyebab terjadinya stunting di Kabupaten Jember dikarenakan tingkat perekonomian masyarakat yang cenderung rendah, kurangnya persiapan orang tua karena terjadinya pernikahan dini, masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya stunting di Kabupaten Jember tersebut paling banyak terjadi di lingkungan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pedesaan dengan pekerjaan utama sebagai petani, buruh ataupun pekerja pabrik. Pemerintah Kabupaten Jember telah berkomitmen serius untuk menurunkan jumlah prevalensi stunting Kabupaten Jember, keseriusan Pemerintah tersebut terbukti dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Jember 188.45/167/1.12/2019 tentang daftar balitastunting sebagai penerima bantuan iuran daerah serta dengan dibentuknya Tim Koordinasi Daerah Perencanaan Teknis Penanganan Balita stunting kabupaten Jember. Sedangkan pada penelitian yang sekarang lebih fokus terhadap bagaimana implementasi dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintha Kabupaten Jember dalam menangani stunting dan mencapai target dari SDGs.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Balita pendek atau stunting merupakan kondisi dimana seorang anak atau balita memiliki tingi badan atau panjang badan yang kurang dari balita normal di usianya, stunting ini sendiri merupakan suatu gangguan pertumbuhan yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang diterima oleh anak dalam jangka waktu yang

lama (Khairani, situasi stunting di Indonesia, 2020). Pemerintah Indonesiasendiri telah menetapkan standar mengenai antropometri penilaian gizi anak yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 tahun 2020 yakni status gizi terhadap anak pendek atau stunting didasarkan pada indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dengan ukuran kurang dari -2 SD (standar deviasi).

Menangani permasalahan stunting ini tentunya bukanlah perkara yang mudah, karena juga perlu menilik faktor penyebabnya pula, stunting ini tentunya tidak akan terjadi begitu saja tanpa penyebab yang jelas, ada banyak faktor yang menyebabkan stunting ini terjadi, seperti dari sektor ekonomi, kesehatan, serta lingkungan pun berpengaruh dalam kasus stunting ini. Masih banyaknya masyarakat dengan tingkat perekonomian yang rendah sehingga konsumsi makanan yang bergizi masyarakat pun juga turut rendah, sedangkan bagi ibu hamil dan balita konsumsi makanan yang bergizi cukup sangatlah penting, belum lagi infrastruktur daerahnya yang apabila infrastrukturnya tidak layak akan mempengaruhi akses masyarakat dalam mendapatkan fasilitas kesehatan secara cepat.

Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Timur merupakan kabupaten yang pada akhir tahun 2020 pernah berada di kisaran angka prevalensi stunting yang cukup tinggi yakni 37,94%, angka tersebut tergolong dalam jumlah yang cukup tinggi jauh di atas rata-rata taraf nasional ataupun skala provinsi Jawa Timur. Tingginya angka indikator stunting tersebut pada tahun 2020 menunjukkan bahwasannya

kondisi permasalahan balita pendek atau stunting saat ini perlu mendapatkan perhatian lebih lagi terutama pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK) anak. Tingginya angka indikator stunting tersebut pada tahun 2020 menunjukkan bahwasannya kondisi permasalahan balita pendek atau stunting saat ini perlu mendapatkan perhatian lebih lagi terutama pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK) anak, didasari oleh hal itulah stunting saat ini menjadi perhatian utama dalam Visi dan Misi Bupati dan Wakil bupati Jember yang diharapkan dari usaha yang dilakukan sedini mungkin ini dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia yang lebih baik dan berdaya saing. Seiring dengan usaha yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Jember jumlah prevalensi stunting di kabupaten Jember mampu mencapai angka 11,74% di tahun 2021

Penemuan kasus stunting ini dapat dilihat dari data yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jember diatas, temuan stunting di Kabupaten Jember didapat akibat adanya penjarangan terhadap masyarakat sebagai sasaran program, dalam proses penjarangan tersebut tentunya tidak semua berjalan mulus begitu saja, tentu ada banyak sekali hambatan yang dihadapi. Hambatan itu seringkali terjadi karena kurangnya kemampuan masyarakat dalam memahami kondisi stunting dyang sebenarnya.

Pencapaian upaya pembangunan berkelanjutan telah tertuang dalam *Sustainable Development Goals* yang di dalamnya terdapat 3 pilar yakni pilar sosial, pilar ekonomi dan juga pilar lingkungan, 3 pilar tersebut tentunya saling berkesinambungan satu dengan yang lainnya,. Implementasi kebijakan

publik merupakan sebuah proses pelaksanaan suatu kebijakan yang di dalamnya berisi proses yang penting dalam penerapan proses kebijakan publik. Van Meter dan Van Horn mengemukakan bahwasannya implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilaksanakan oleh para pelaku organisasi di tingkat pemerintahan ataupun swasta yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ranah implementasi kebijakan ini merupakan bagian yang cukup sulit dan krusial karena implementasi nantinya dapat membawa suatu perubahan yang cukup besar dan dampak yang luar biasa serta nantinya implementasi kebijakan ini dapat menjadi tolak ukur dari tercapainya suatu kebijakan atau program yang menjadi produk dari pemerintah. Dari temuan data yang telah di dapatkan dilapangan peneliti menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn yang menggunakan pendekatan *top-down* dirasa sesuai dengan apa yang akan di teliti pada penelitian ini.

Ukuran dan tujuan kebijakan

SDGs telah menetapkan beberapa target ataupun indikator yang harus dicapai pada tahun 2030, mengenai penanggulangan stunting sendiri diharapkan mampu turun sebanyak 40% pada tahun 2025 dan adanya ketahanan pangan. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia juga turut berupaya untuk menurunkan jumlah stunting sebanyak 14% pada tahun 2024. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga berencana merupakan lembaga pemerintahan di Kabupaten Jember yang ditunjuk langsung oleh Bupati

Jember untuk turut membantu Pemerintah Kabupaten Jember dalam upaya pencapaian penurunan stunting sesuai dengan Keputusan nomor 188.45/61/1.12/2022 tentang pembentukan tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Jember (TPPS) yang diketuai langsung oleh Wakil Bupati Kabupaten Jember. Dalam tugasnya ini terdapat beberapa program yang dibuat contohnya penguatan program Keluarga Berencana dan sosialisasi pada remaja, Dinas Kesehatan pun juga menjalankan program-program penanganan stunting yakni dengan menggunakan upaya sensitif dan juga upaya spesifik. Program-program tersebut harapan mampu menekan angka stunting di Kabupaten Jember, yang berarti program tersebut sudah sesuai dengan tujuan dan ukuran kebijakan yang dibuat.

Sumber Daya

Sumber daya ini merupakan elemen yang penting dalam proses implementasi suatu kebijakan, keberhasilan dari suatu kebijakan pun juga dapat diukur dari kemampuan dalam menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tersebut. Sumber daya ini meliputi sumber daya manusia dan sumber dana yang digunakan. Dalam pelaksanaan suatu program kegiatan atau suatu kebijakan maka tidak akan jauh dari permasalahan penganggaran dana yang juga menunjang keberlangsungan program serta capaiannya, apabila tidak tercukupinya dana dan penganggaran suatu program maka tentu saja program tersebut tidak akan mampu terlaksana secara keseluruhan. Berdasarkan data yang diperoleh dari IbuDyah Kusworini Indriaswati, SKM., MSi selaku Ketua

Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi, Penggerakan dan Informasi anggaran untuk sebagian program penanggulangan stunting yakni

dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran DP3AKB pada tahun 2022 yang berkaitan dengan program penanggulangan stunting Kabupaten Jember

Tabel 2 Anggaran Kegiatan Kaitan Stunting Dokumen Anggaran Kegiatan DP3AKB

Tabel 1 Data Jumlah Anggaran Kegiatan Pencegahan Stunting DP3AKB

No	Nama Kegiatan	Anggaran
1.	Audit Kasus Stunting	Rp.40.000.000
2.	Cetak data keluarga resiko stunting	Rp.72.250.200
3.	Sivelien stunting tingkat desa	Rp.6.750.000.000
4.	Pendampingan calon pengantin desa	Rp. 380.940.000
5.	Pendampingan Ibuhamil di desa	Rp.2.963.280.000
6.	Pendampingan pascapersilan di desa	Rp.740.820.000

Sumber: Dokumen data DP3AKB 2022

Tabel anggaran diatas merupakan klasifikasi penganggaran kegiatan penanggulangan stunting yang dilaksanakan oleh bidang pengendalian penduduk dan advokasi, penggerakan dan informasi saja. Sedangkan data berikut merupakan data yang diperoleh

No	Uraian kegiatan	Jumlah anggaran
1.	Penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)	Rp. 1.190.400.000
2.	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MJKP)	Rp. 1.297.177.000
3.	Pengendalian program KKBPK	Rp. 40.000.000
4.	Pelaksanaan program KKBPK di kampung KB	Rp. 896.999.800

Sumber: Dokumen Perencanaan Anggaran DP3AKB 2022

Jumlah diatas merupakan penganggaran yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pengendalian penduduk ini dilakukan agar tidak banyak calon Ibuyang hamil tanpa perencanaan dan kesiapan baik secara fisik, mental dan ekonomi.

Karakteristik Agen Pelaksana

Permasalahan stunting ini sendiri bukanlah semata-mata menjadi tanggung jawab dari Dinas Kesehatan dan juga DP3AKB saja, namun tentunya perlu adanya sinergi, bantuan dan usaha dari seluruh pihak dan

lembaga lainnya agar percepatan penurunan stunting di Kabupaten Jember dilakukan dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Stunting ini sendiri bukanlah permasalahan yang dapat diatasi dengan mudah, pastinya banyak sekali hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mengatasinya, sudah dari lama Jember terus berusaha dalam menurunkan angka prevalensi stunting. Dinas Kesehatan dan DP3AKB telah melakukan berbagai macam kegiatan guna memaksimalkan upaya penurunan stunting di Kabupaten Jember ini namun tentunya seluruh kegiatan tidak akan mampu berjalan secara optimal apabila tidak ada bantuan dan dukungan dari seluruh elemen di Kabupaten Jember, oleh karena itu Bupati Jember mengeluarkan aturan mengenai pembentukan tim khusus yang dibentuk guna saling menjadi tempat bagi seluruh lembaga untuk bersinergi bersama dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Jember yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Jember nomor 188.45/61/1.12/2022. Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Jember ini di bentuk khusus untuk mempermudah memberikan kelancaran bagi para lembaga yang melaksanakan tugas program penurunan stunting ini, TPPS ini diketuai langsung oleh Wakil Bupati Kabupaten Jember yakni Bapak KH. MB Firjaun Barlamman yang ditunjuk dan ditugasi langsung oleh Bupati Kabupaten Jember.

TPPS ini merupakan bentuk nyata upaya pemerintah Jember dalam menangani stunting dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada dari tingkat kabupaten hingga desa, sehingga seluruh pihak yang ada dan memiliki bagian dalam tim ini saling bersinergi dalam menanggulangi

permasalahan stunting dari hulu nya atau dari tingkat desa agar dapat terintegrasi dengan baik.

Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana

Implementasi akan dapat dilaksanakan secara efektif apabila kebijakan tersebut dapat dipahami oleh seluruh pihak atau lembaga yang bertanggung jawab dan sesuai dengan target sasaran, sehingga dalam pelaksanaan kebijakan haruslah dijalankan oleh pihak-pihak yang memang mampu dan sesuai dibidangnya. Maka dari itu agar komunikasi yang dilakukan dapat sesuai dan selaras dengan kebijakan yang dibuat maka perlu adanya monitoring dan juga komunikasi antar sektor lembaga yang terlibat dalam proses percepatan penurunan stunting agar dapat menyamakan sinergitas antar lembaga terkait. Pemerintah Kabupaten Jember sendiri telah melakukan monitoring secara berkala yang dilakukan setiap satu bulan sekali, dalam monitoring tersebut diharapkan nantinya segala permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam proses penanganan stunting dapat di diskusikan secara bersama-sama dan dicari jalan keluar atau solusinya

Mulai dari TPPS tingkat kecamatan hingga kabupaten menyampaikan hasil perkembangan stunting. Komunikasi ini perlu ada dan dijalankan agar dapat tercapai tujuan dari setiap program tersebut apabila komunikasi antar lembaga dapat dijalankan dengan baik pastinya penyelarasan program pun dapat terlaksana dengan baik sehingga hasil akhir dari tujuan tersebut dapat tercapai sesuai dengan yang telah di agendakan.

Sikap dan kecenderungan para pelaksana

Kebijakan mengenai percepatan penanggulangan stunting ini sendiri sebenarnya sudah memiliki tanggapan positif dari seluruh agen pelaksana kebijakan, terlebih adanya Peraturan Presiden terkait percepatan penanganan stunting ini semakin meningkatkan sinergi serta upaya seluruh lembaga ataupun pihak yang terlibat dari seluruh tingkatan untuk bekerja sama meningkatkan upaya pemerintah dalam menurunkan jumlah stunting di Indonesia, tidak hanya menjadi program nasional saja permasalahan stunting ini sudah menjadi permasalahan dunia, seluruh dunia pun sedang berupaya dalam menurunkan angka prevalensi stunting di negara nya masing-masing, hal tersebut sejalan dengan tujuan dunia yang terangkum dalam SDGs. maka dari itulah Pemerintah Kabupaten Jember melakukan berbagai upaya dalam membantu dan mensukseskan program dunia ini. Bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Jember ini dengan melibatkan seluruh sektor lembaga yang ada di Kabupaten Jember mulai dari tingkat desa hingga Kabupaten untuk bekerja sama dan menyamakan langkah dan tujuan demi Jember bebas stunting.

Kondisi lingkungan, sosial dan politik

Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwasannya dalam menilai kinerja implementasi kebijakan itu dapat dilihat dari sejauhmana lingkungan eksternal juga turut serta dalam mencapai keberhasilan, lingkungan, sosial dan juga ekonomi. dalam permasalahan stunting di Kabupaten Jember tentunya akan

memiliki dampak yang besar terhadap lingkungan masyarakat, karena seperti lingkungan mempengaruhi perilaku dan juga sikap masyarakat, dalam lingkaran stunting ini sendiri lingkungan masyarakat yang tidak bersih tentunya akan semakin menambah tinggi jumlah penderita stunting. Lingkungan yang tidak sehat akan berpengaruh pada kondisi kesehatan ibu hamil, apabila kondisi ibu hamil tidak sehat pastinya nantinya akan berpengaruh pada kondisi bayinya. Maka dari itulah lingkungan sangat mempengaruhi proses kesehatan dan proses implementasi kebijakan, lingkungan yang jauh dari teknologi maka kemampuan dan juga pengetahuan masyarakatnya pun akan kurang. Tidak hanya faktor lingkungan, faktor ekonomi pun memiliki pengaruh yang cukup besar pula karena berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, terkadang masyarakat masih belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya hingga mereka berada di taraf perekonomian yang rendah. apabila penghasilan masyarakat rendah pastinya masyarakat akan kesulitan untuk mendapatkan makanan yang sehat dan juga bergizi

V. KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwasannya implementasi kebijakan pemerintah kabupaten Jember dalam penanganan kasus stunting ini sudah berjalan dengan baik, hal tersebut dibuktikan dengan komitmen pemerintah dalam membentuk tim khusus serta program khusus penanganan stunting, tidak hanya itu penganggaran yang digunakan dalam proses implementasi kebijakan ini pun telah diintegrasikan dengan baik dan disesuaikan dengan

klasifikasi kebutuhan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Jember pun telah melakukan koordinasi dengan baik dengan melakukan monitoring setiap satu bulan sekali, pemerintah terus memberikan dukungan dan bantuannya dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten Jember hal tersebut dibuktikan dengan menurunnya angka prevalensi stunting kabupaten Jember yang pada tahun 2021 telah mampu mencapai angka prevalensi menjadi 11,74%

Hasil tersebut membuktikan bahwa pengimplementasian kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Jember telah terlaksana dengan baik dan terintegritas sehingga angka stunting dapat ditekan, tentunya usaha tersebut perlu dilakukan kerja sama bagi seluruh pihak dan elemen di Kabupaten Jember, tidak hanya dari pemerintah saja namun masyarakat pun perlu sadar untuk menjaga lingkungannya agar pencegahan stunting dapat dijalankan secara efektif. Implementasi kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Jember dalam menangani stunting ini dilakukan sebagai upaya percepatan pencapaian target dai SDGs

VI. UCAPAN TERIMAKASIH

Puji ssyukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga dapat memberikan kemampuan dan kenikmatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan penelitian ini. Pertama syukur penulis ucapkan kepada diri sendiri karena telah bekerja keras dalam menyelesaikan penulisan ini. Kedua terimakasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua karena telah dengan tulus memberikan doa dan dukungan yaang tiada

putusnya. Kepada Dosen Pembimbing saya Drs. Itok Wicaksono, M.Si yang telah memberikan bimbingan dalam penelitian ini

Kepada Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana serta Dnas Kesehatan Kabupaten Jember yang telah bersedia menjadi narasumber dalam proses penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana . *Jurnal Administrasi Publik*, 2.

Anggleni, A. (2018). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU KELUARGA SEJAHTERA (KKS) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN DI KELURAHAN SEKIP JAYA KECAMATAN KEMUNING KOTA PALEMBANG. *Ejournal Program Pasca Sarjana*, 28-30.

BPS, & Indonesia, S. W. (2020). *Laporan Indeks Khusus Penanganan stunting 2019-2020*. Jakarta: BPS.

- Budi Sulistyowati, M. (2013). Sosiologi Suatu Pengantar. In S. Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (p. 323). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- hatta, m. (2021, september 22). *Angka Stunting di Jember 37,08 Persen, Peringkat 2 di Jatim*. Retrieved february 15, 2022, from FaktualNews.co: <https://faktualnews.co/2021/09/2/angka-stunting-di-Jember-3708-persen-peringkat-2-di-jatim/280153/>
- Indah Budiastutik, M. Z. (2018). Faktor Resiko Stunting pada anak di Negara Berkembang . *Amerta Nutrition*, 1-2.
- Jember, D. K. (2020). *Profil Kesehatan Kabupaten Jember 2020* . Jember: Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
- Jember, p. (2022, maret 08). *Gerak Bersama Turunkan Stunting di Jember*. Retrieved maret 10, 2022, from Pemkab Jember: <https://www.Jemberkab.go.id/gerak-bersama-turunkan-stunting-di-Jember/>
- Jember, P. K. (2022). *geografis dan topografi*. Retrieved juni 10, 2022, from Pemerintah Kabupaten Jember: <https://www.Jemberkab.go.id/selayang-pandang/geografis-dan-topografi/>
- kemenkes. (2009). *undang undang kesehatan no 36 2009*. Retrieved mei 15, 2022, from https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/UU_36_2009_Kesehatan.pdf
- kemenkes. (2018, mei 24). Retrieved february 15, 2022, from <https://www.kemkes.go.id/article/view/18052800006/ini-penyebab-stunting-pada-anak.html>
- Khairani, S. M. (2020). *situasi stunting di Indonesia* . Jakarta: pusat data dan informasi kementerian kesehatan RI.
- Khairani, S. M., & Andri Musyrita, S. M. (2020). *Situasi Stunting di Indonesia* . Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI.

Mutia, A. (2021, november 25).
*Prevalensi Stunting Balita
Indonesia Tertinggi ke-2 di Asia
Tenggara*. Retrieved february 16,
2022, from databoks:
[https://databoks.katadata.co.id/d
atapublish/2021/11/25/prevalens
i-stunting-balita-indonesia-
tertinggi-ke-2-di-asia-tenggara](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/25/prevalensi-stunting-balita-indonesia-tertinggi-ke-2-di-asia-tenggara)

Indriyani, D., Azza, A., & Angin, R.
(2021). PKM Kelompok Ibu
Rumah Tangga Sebagai
Perawat Terbaik Dalam
Perawatan Bayi Berat
Badan Lahir Rendah
(BBLR) di Rumah. *J-
Dinamika: Jurnal
Pengabdian
Masyarakat*, 6(1), 40-50.

Adawiyah, P. R. (2022). Inovasi
Program Ruang Rindu
(Ruang Pemberdayaan Dan
Perlindungan Ibu-Anak)
Untuk Perempuan Korban
KDRT Dan Penurunan Aki
Dan AKB Di Kabupaten
Banyuwangi. *National
Multidisciplinary
Sciences*, 1(4), 562-571.